
PERTANIAN KUAT, EKONOMI BANGKIT

Artikel dimuat di buku "Jebakan Krisis dan Ketahanan Pangan: Sehimpun Saran dan Solusi"

“DALAM SITUASI INI, NEGARA HARUS HADIR UNTUK MENYELAMATKAN SEKTOR PERTANIAN.

DI SINILAH KEBERPIHAKAN **POLITIK PERTANIAN** MELALUI PENETAPAN PRIORITAS KEBIJAKAN & PERBAIKAN TATA KELOLA PERTANIAN NASIONAL MENJADI TERASA PENTING & RELEVAN UNTUK DILAKUKAN.”

Indonesia adalah negara agraris. Namun, menjadi miris saat kita mencermati data dan fakta yang menunjukkan bahwa pemenuhan bahan baku industri makanan nasional sebesar 60 persen berasal dari impor. Hal ini memunculkan pertanyaan mendasar tentang bagaimana strategi dan pelaksanaan ketahanan pangan di Tanah Air.

Di sisi lain, kita juga memahami bahwa sektor pertanian menghadapi persoalan klasik yang belum juga menemukan solusi tepat untuk menghadapinya. Misalnya, lahan pertanian yang cenderung turun dari waktu ke waktu. Data Badan Pusat Statistik (2018) menunjukkan bahwa rata-rata 27 ribu hektar lahan pertanian berkurang di Indonesia setiap tahunnya, dan beralihfungsi untuk kepentingan lainnya. Data sensus BPS (2018) mencatat terjadi penurunan luas baku lahan pertanian nasional dari 7.75 juta hektar di sensus 2013 menjadi 7.1 juta hektar pada 2018. Penurunan terbesar masih terjadi daerah yang seringkali menjadi sentra lumbung pangan nasional, Jawa Barat dan Nusa Tenggara Barat.

Di saat yang sama, Nilai Tukar Petani (NTP) sebagai indikator tingkat daya beli dan tingkat kesejahteraan petani juga tidak stabil. Dalam beberapa tahun terakhir, kenaikan NTP juga terasa belum signifikan. Bahkan sejumlah kelompok petani di daerah yang saya temui dalam berbagai kunjungan juga sering mengeluhkan semakin kuatnya tekanan profesi sebagai petani. Mulai dari langkanya bibit, tidak tepatnya subsidi pupuk, hingga nilai harga jual komoditas masih sering dimainkan oleh tengkulak-tengkulak besar.

Karena profesi petani dianggap kurang menjanjikan, akhirnya muncul tren penurunan jumlah profesi petani di kalangan masyarakat perdesaan. Data BPS (2013-2019) menunjukkan tren penurunan jumlah penduduk yang bekerja di sektor pertanian dari 39.22 juta pada 2013 menjadi 37.77 juta

pada Februari 2016. Sedangkan pada tahun 2017 hingga 2018, penurunan jumlah petani terjadi cukup signifikan hingga diperkirakan menyentuh 33.4 juta orang. Sementara jika ditelisik lebih mendalam, menurut data Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) Kementerian Pertanian, lebih dari 90 persen dari 33.4 juta petani yang ada saat ini mayoritas petani tua. Sementara petani muda di Indonesia yang berusia 20-39 tahun diperkirakan hanya berjumlah 2.7 juta orang, dimana terjadi penurunan jumlah petani muda sebesar 415.789 orang dari periode 2017 ke 2018 (Kementan, 2019). Artinya, jika tren ini dibiarkan berlanjut, bangsa Indonesia akan mengalami krisis profesi petani pada 10 tahun mendatang.

Karena itu, berdasarkan peta masalah dasar sektor pertanian nasional di atas, maka sejumlah keberpihakan kebijakan 'politik pertanian' menjadi penting dan relevan untuk dijalankan oleh semua *stakeholders*, termasuk partai politik, untuk memberikan *affirmative actions* untuk para petani nasional agar tidak terpinggirkan di tengah menguatnya sektor jasa dan manufaktur di Tanah Air. Karena itu, kebijakan politik pertanian ke depan harus diorientasikan kepada hal-hal sebagai berikut.

Pertama, merevitalisasi strategi dan pendekatan untuk menghentikan tren penurunan lahan pertanian, ketidakstabilan Nilai Tukar Petani (NTP), isu produktivitas, dan menurunnya minat tenaga kerja muda di bidang pertanian. Karena itu, diperlukan upaya yang lebih gigih untuk memperkuat program-program untuk meningkatkan komitmen dan loyalitas para petani muda nasional dengan pendekatan modernisasi berbasis teknologi dan kearifan lokal. Dengan demikian, sektor pertanian dan agrobisnis di Indonesia ke depan tidak hanya diharapkan mampu mencukupi kebutuhan dalam negeri, tetapi juga berorientasi ekspor agar daya saing petani nasional kian meningkat.

Kedua, mengembangkan program-program pembangunan berbasis perdesaan dengan memanfaatkan penggunaan dana desa yang produktif dan tepat guna, mengembangkan BUMDes sebagai motor penggerak ekonomi perdesaan, serta meningkatkan partisipasi kaum muda dan perempuan di desa dalam kegiatan ekonomi produktif. Dengan meningkatkan peran generasi muda menjadi petani mandiri, modern, dan terorganisir, maka diharapkan akan menjadi penggerak sektor pertanian secara nasional.

Ketiga, mengembalikan peran Bulog sebagai Lembaga Penyangga Pangan Nasional untuk menjamin stabilitas harga pangan dan pasokannya juga terjamin. Untuk itu, Bulog perlu didorong agar bisa membangun sinergi dari hulu ke hilir untuk sektor pertanian dan kelautan termasuk di dalamnya industri terkait seperti produksi pupuk, benih, bibit, alat pertanian, hingga fasilitas pengolahan dan produk turunan serta distribusinya hingga ke pasar. Juga tercakup di dalamnya akses ke permodalan dan pendayagunaan teknologi

Keempat, meningkatkan peran penyuluh dalam mendorong capaian kedaulatan, kemandirian, ketahanan, dan keamanan pangan, dengan program khusus penyuluh penggerak petani mandiri. Kebijakan swasembada pangan hanya dapat dicapai dengan basis data yang lebih lengkap dan terukur.

Kelima, melakukan evaluasi mendalam terhadap proses penentuan kuota impor bahan pangan serta penerbitan lisensi agar lebih terukur sehingga tidak merugikan petani/nelayan/produsen pangan dalam negeri maupun konsumen rumah tangga.

Kelima strategi ini adalah penerjemahan dari “keberpihakan politik pertanian” yang harus kita kawal bersama secara konstruktif, demi kemaslahatan para petani dan ekonomi nasional.

Selamatkan Sektor Pertanian dari Dampak Covid-19

Sementara itu, pandemi Covid-19 kini telah berdampak signifikan terhadap ekonomi nasional. Di kuartal II 2020 ini, pertumbuhan ekonomi nasional merosot tajam sekitar delapan persen, dari 2.97 persen pada kuartal I menjadi -5.32 persen pada kuartal II. Berdasarkan data struktur dan pertumbuhan PDB menurut lapangan usaha di kuartal II, BPS (2020) menjelaskan bahwa sektor pertanian merupakan sektor terbesar kedua yang berkontribusi besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Pada kuartal II ini, meskipun juga mengalami tekanan, sektor pertanian menjadi satu-satunya dari lima besar sektor utama yang masih bisa bertahan di angka positif, yakni 2.19 persen. Sedangkan sektor industri tertekan kuat -6.19 persen, penurunan sektor perdagangan menembus -7.57 persen, sektor konstruksi -5.39 persen, dan sektor pertambangan -2.72 persen.

Pada kuartal III, memang akan ada masa panen. Namun kontribusi panen pertanian di kuartal III umumnya tidak setinggi di kuartal II. Artinya, potensi terjadinya tekanan pada sektor pertanian pada kuartal III dan IV akan lebih besar. Jika tekanan ini tidak tertolong oleh sektor-sektor utama yang lain, terlebih lagi aspek belanja negara (*government spending*), maka pertumbuhan ekonomi kuartal III berpotensi masih minus. Jika itu terjadi, maka akan menandai dimulainya resesi ekonomi di Indonesia (World Bank, 2020; BPS, 2020). Tentu kita berharap ada perbaikan signifikan terhadap penanganan pandemi dan peningkatan aktivitas ekonomi di kuartal III dan IV, serta awal tahun 2021 nantinya.

Namun harus diantisipasi, di tengah ketidakpastian kondisi ekonomi nasional, sektor pertanian berpotensi besar sangat terdampak oleh pengaruh panjang pandemi ini. Hal itu ditandai oleh menurunnya hasil produksi, penyerapan tenaga kerja, dan juga pendapatan rumah tangga petani pasca pengetatan mobilitas masyarakat melalui kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Hal itu dikonfirmasi oleh hasil penelitian IPB (Juni 2020) yang menggunakan pendekatan *computable general equilibrium (CGE) recursive dynamic*, dimana sektor pertanian diperkirakan akan mengalami tekanan serius di sisi penawaran dan permintaan. Tekanan itu berpotensi terasa lebih berat jika muncul risiko iklim ekstrem dan juga gelombang ruralisasi atau perpindahan penduduk dari kota ke desa yang disebabkan oleh ketidakmampuan masyarakat bertahan di kehidupan perkotaan yang menuntut biaya hidup (*living cost*) tinggi di tengah pandemi.

Dalam situasi ini, negara harus hadir untuk menyelamatkan sektor pertanian dan juga keluarga para petani. Di sini lah keberpihakan ‘politik pertanian’ melalui penetapan prioritas kebijakan dan perbaikan tata kelola pertanian nasional menjadi terasa penting dan relevan untuk dilakukan.

Di tahap awal, upaya penyelamatan sektor pertanian ini dapat dijalankan melalui pemberian stimulus untuk meningkatkan hasil produksi, khususnya komoditas kebutuhan pokok lainnya padi, jagung, gula, dan sayur-sayuran. Stimulus yang diorientasikan pada hasil produksi ini juga dapat diarahkan pada jaminan input pertanian, lainnya ketersediaan dan keterjangkauan

harga bibit, pupuk, obat-obatan, dan juga sarana pra-sarana pertanian. Jika intervensi negara melalui stimulus sektor pertanian tidak diberikan, maka pertumbuhan hasil produksi bisa mencapai negatif 4.92-10.4 persen. Namun jika stimulus itu diberikan dan tepat sasaran, dampak destruktif ekonomi di komoditas padi ini bisa dinetralisir dengan baik (IPB, 2020).

Selanjutnya, stimulus juga perlu diberikan untuk menekan tren negatif dalam penurunan penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian. Ketika sasaran utama sumber daya manusia di sektor pertanian bisa dikelola, maka pendapatan rumah tangga buruh tani dan juga pengusaha pertanian di perdesaan juga dapat diselamatkan. Untuk itu, upaya perbaikan data bantuan sosial dan padat karya, baik yang berasal dari alokasi anggaran pusat maupun daerah, benar-benar harus tepat sasaran.

Problem data yang tumpang tindih, tidak *update*, hingga kebingungan dalam penentuan target-target sasaran bantuan dari alokasi pusat dan daerah tidak hanya berpotensi membuka peluang penyalahgunaan anggaran negara, tetapi juga akan memunculkan dampak sosial-ekonomi yang lebih besar di tengah ketidakpastian situasi pandemi ini. Karena itu, seluruh *stakeholders* antar lembaga negara dan juga antara pemerintah pusat dan daerah harus benar-benar berkomitmen untuk memperbaiki transparansi dan akuntabilitas data di lapangan.

Sinkronisasi data untuk distribusi stimulus secara tepat sasaran ini juga semakin urgen dan relevan mengingat segmen dan komposisi masyarakat perdesaan cenderung semakin kompleks pasca terjadinya gelombang ruralisasi di tengah pandemi ini. Karena itu, komunikasi dan koordinasi dengan seluruh *stakeholders* dengan elemen pemerintahan terkecil di negara ini, menjadi penting untuk menyelamatkan kelompok masyarakat terdampak pandemi di perdesaan dan juga sektor pertanian yang semakin rentan.

Jika langkah awal ini dapat dijalankan dengan tepat, maka kebijakan ini akan berdampak positif terhadap para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang fokus pada makanan olahan pangan. Namun sebaliknya, jika sektor UMKM sektor pangan ini juga tidak disentuh, maka hasil produksi pangan tidak akan terserap dengan baik oleh permintaan pasar yang memang cenderung menurun di era pandemi ini. Karena itu,

keberpihakan pemerintah terhadap sektor pertanian dan pelaku usaha di komoditas pangan harus benar-benar dilakukan melalui berbagai langkah afirmasi berbasis sains dan teknologi agar setiap kebijakan pemerintah bisa hadir sebagai solusi permasalahan rakyat, bukan juga menambah kompleksitas persoalan yang ada.

Untuk itu, penyelamatan sektor pertanian ini juga harus dikoordinasikan dengan baik bersama pemangku kebijakan yang fokus pada penyelamatan ekonomi UMKM. Hal ini penting karena UMKM adalah segmen besar ekonomi nasional yang menyediakan lapangan kerja bagi 60 persen penduduk Indonesia. Selain itu, UMKM juga sering terbukti mampu menjadi katup pengaman ekonomi negara di tengah krisis ekonomi dan moneter (1998/2008).

Namun akibat pandemi Covid-19 ini, UMKM menjadi salah satu sektor yang paling terdampak signifikan. Sebab, kebijakan PSBB juga berimplikasi langsung pada tiga aspek utama, yakni; sisi permintaan (*demand*) atas produk barang dan jasa, pasokan barang/ bahan baku untuk proses produksi, dan juga sumber modal usaha lainnya pengembalian kredit atau pinjaman yang tersendat karena sirkulasi usaha terganggu.

Karena itu, prioritas penyelamatan ekonomi nasional harus benar-benar diorientasikan pada penyelamatan sektor pertanian dan UMKM nasional. Jika sebelumnya diarahkan pada upaya peningkatan hasil produksi pertanian dan daya tahan petani di era pandemi, langkah-langkah pemerintah ke depan juga perlu mempercepat pemberian dukungan *marketing online* pada pelaku usaha UMKM untuk memudahkan sirkulasi pasar dan permintaan barang. Saat ini, diperkirakan baru 13 persen atau sekitar delapan juta pelaku UMKM yang menggunakan pemasaran *online* (Kementerian Koperasi dan UKM, 2019). Artinya, pemerintah masih punya pekerjaan besar untuk memberikan pendampingan teknis inovatif dan melakukan penetrasi pasar melalui sistem *online* ke 87 persen UMKM yang masih tersisa.

Langkah pendampingan oleh pemerintah bisa diarahkan melalui strategi penguatan *digital marketing* maupun melalui penciptaan kerja sama yang saling menguntungkan (*mutual-cooperation*) antara swasta besar dan sektor

UMKM di akar rumput. Tentu ini tugas berat, namun langkah perbaikan itu harus dimulai sekarang juga, demi daya tahan ekonomi kerakyatan di Indonesia. •



AHY berdialog dengan petani di Banyuwangi saat keliling Nusantara, 6 April 2020.